



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# RECANA KINERJA DEPUTI I POLDAGRI TAHUN 2024



@polhukamri

@deputi1polhukam

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai penjabaran dari aktivitas program dan kegiatan selama satu tahun sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Instansi Pemerintah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024, dengan harapan dapat memberikan kontribusi unit kerja Instansi Pemerintah dalam rangka rencana pembangunan di bidang koordinasi politik dalam negeri guna menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Kedeputan Bidkooor Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan unit kerja Deputy Bidkooor Politik Dalam Negeri, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

**Jakarta, Januari 2024**  
**Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**



**Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr (Han)**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tusi dan Struktur Deputy Bidkooor Poldagri .....	2
D. Maksud dan Tujuan .....	4
E. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	4
F. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	5
G. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB II PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN ISU PRIORITAS .....</b>	<b>28</b>
A. Prioritas Nasional .....	28
B. Program Prioritas, Kegiatan Prioritas .....	28
C. Isu Prioritas .....	30
<b>BAB III STRATEGI DAN INDIKATOR CAPAIAN STRATEGI .....</b>	<b>32</b>
A. Visi dan Misi .....	32
B. Tujuan .....	34
C. Arah Kebijakan dan Strategi .....	36
D. Sasaran Strategi .....	36
E. Indikator Capaian Strategi .....	37
F. Rencana Aksi Untuk Mencapai Kinerja .....	39
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>46</b>
A. Target Kinerja .....	47
B. Kerangka Pendanaan .....	47
<b>BAB V PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. RKT ESELON 2	
2. RENCANA AKSI	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja atau unit organisasi instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan kerja atau unit organisasi yang akan dicapai pada tahun berjalan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Dinamika politik dalam negeri dari tahun ke tahun selalu menunjukkan pluktuatif, ini terlihat dari adanya beberapa peristiwa dan konflik yang terjadi. Namun demikian hal tersebut dapat dikendalikan sehingga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dapat kondusif.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi salah satu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi. Sebagai manajer pada suatu instansi harus dapat mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan visi dan pencapaian misi organisasi. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen LAKIP dan juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya/Akuntabilitas Kinerjanya.

Menurut Permenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian Indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi politik dalam negeri, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan perlu menyusun RKT Tahun 2024 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2020-2024.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Deputy Bidang Koordinasi Dalam Negeri adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020-2024
4. Renstra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6. Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2020-2024.

## **C. Tusi dan Struktur Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

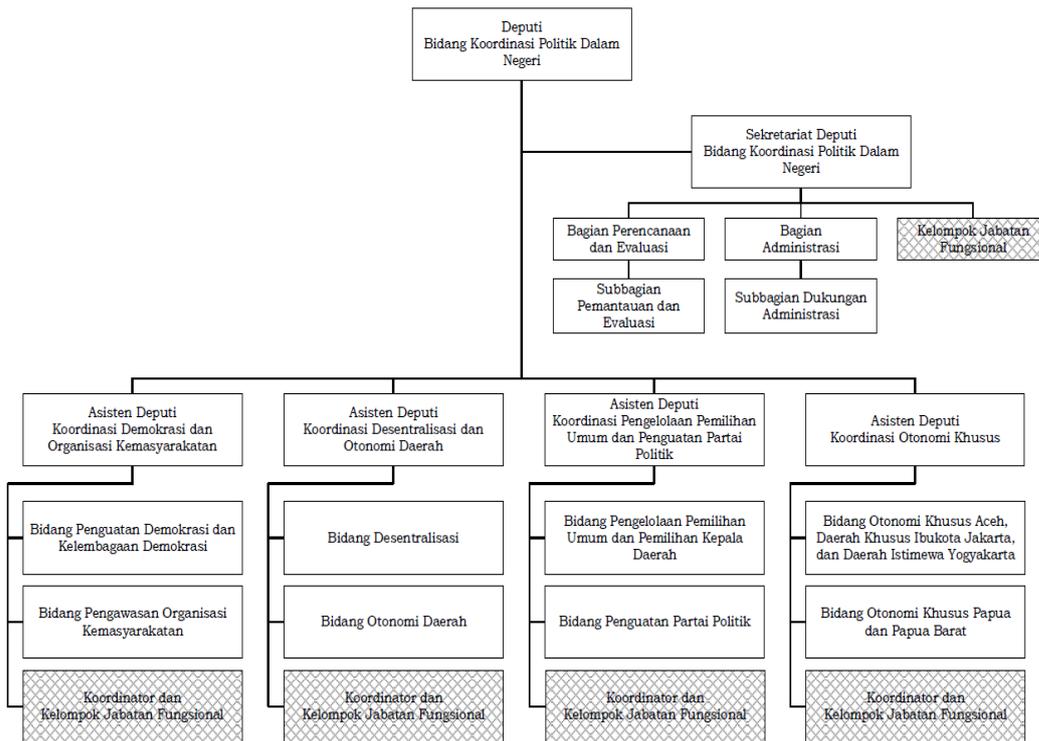
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Tugas dan fungsi dalam rangka dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, Desk Koordinasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kemenko Polhukam Tahun 2024, Pokja Papua Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, pemantauan, forum koordinasi, seminar, *focus group discussion*, monitoring dan lain-lain yang menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam.

Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merupakan unit eselon I pada Kemenko Polhukam yang dipimpin seorang deputi. Deputi memiliki empat Asisten Deputi dan satu Sekretaris. Masing-masing Asisten Deputi memiliki Kepala Bidang dan Sekretaris memiliki Kepala Bagian. Dengan demikian, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dijabarkan pada gambar di bawah.

Gambar 1.1.  
Susunan Organisasi Deputy Koordinasi Politik Dalam Negeri



#### D. Maksud dan Tujuan

- Maksud. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Tujuan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

#### E. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diukur dari dua sasaran strategis dengan menggunakan tujuh indikator kinerja. Selama tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Capaian Indikator Kinerja Deputy I/Poldagri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2023
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%	108,4%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96%
Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri	4. Nilai SAKIP	BB	BB
	5. Nilai PMPRB	33,94	
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4	4
	7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy.	85	90,25

Analisis capaian kinerja sebagai berikut :

#### F. Analisis Capaian Kinerja

##### 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif

Pencapaian sasaran strategis 1 adalah untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri. Pengukuran sasaran strategis menggunakan alat ukur tiga indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis 1**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%	108,4%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96%

**a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam**

Dalam manual perjanjian kinerja yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yang dimaksud indikator target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilihat dari aspek penting demokrasi yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek ini diturunkan ke dalam 22 indikator yang diukur setiap tahun dan disajikan dalam laporan berkala.

Pengumpulan data IDI dilakukan dengan metode yang berlapis berdasarkan prinsip triangulasi. Sumber data utamanya adalah koding surat kabar dan dokumen, diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (*focused-group discussion*) di tingkat provinsi, dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam. Konsepsi IDI dan operasionalisasi metodologinya dengan hati-hati mempertimbangkan kekhasan kondisi sosial politik di Indonesia (*country led specific*) sekaligus kompleksitas demokrasi sebagai fenomena global. IDI menjadi salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan Pemerintah sejak RPJMN 2010 – 2014 hingga periode RPJMN 2020 –

2024, dan merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung pada 2009 dan yang paling baru IDI 2022 (diukur dan dirilis pada TA 2023).

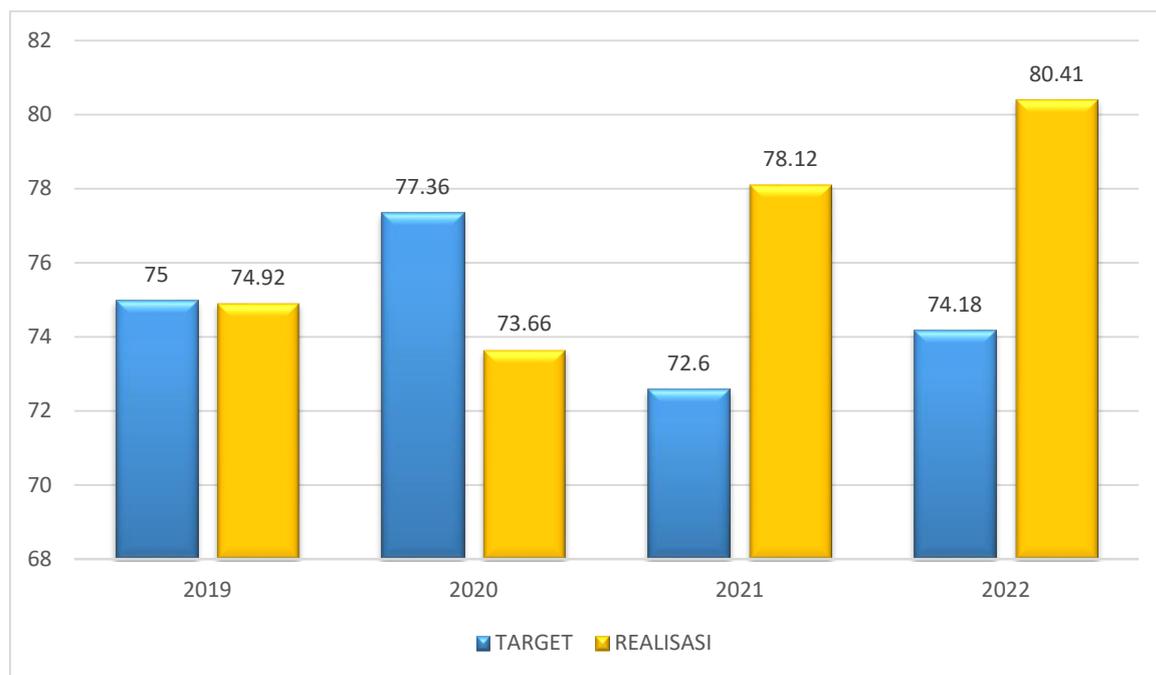
Nilai strategis IDI terletak pada angka yang dihasilkan yang menunjukkan potret demokrasi baik di level provinsi maupun nasional, sehingga Pemerintah memiliki pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya. Selain oleh pemerintah, IDI juga dimanfaatkan untuk advokasi maupun rujukan bagi masyarakat sipil dan akademisi. Untuk menyebut sejumlah contoh, IDI dimanfaatkan sebagai bahan masukan sebagai visi-misi kandidat dalam Pemilu, advokasi oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan berbagai aspek demokrasi, seperti kuota perempuan, perbaikan mekanisme pengaduan, peningkatan kualitas Perda, dan peningkatan distribusi bansos. Bagi masyarakat sipil dan akademisi, data IDI membantu memberikan gambaran perkembangan kualitas demokrasi dan isu-isu penting apa yang harus ditindaklanjuti.

Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Klasifikasi hasil pengukuran IDI dibagi menjadi tiga kategori yakni tinggi (skor >80), sedang (skor 60-80) dan rendah (skor <60).

Target hasil pengukuran IDI 2022 sesuai RKP 2023 sebesar 78,92 dan target IDI pada akhir periode RPJMN 2020-2024 sebesar 79,58. Namun demikian, dalam perjanjian kinerja, target capaian IDI hanya 94% dari target RKP (78,92) yakni sebesar 74,18.

Hasil penghitungan nilai IDI tahun 2022 yang dirilis tahun 2023 adalah sebesar 80,41. Capaian tersebut meningkat 2,29 poin dari IDI tahun 2021 yang hanya 78,12. Dengan capaian ini, IDI tahun 2022 untuk pertama kalinya masuk dalam kategori tinggi/baik. Capaian tersebut dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini:

**Grafik 1 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2019 s.d. 2022**



Nilai IDI tahun 2022 juga dapat dikatakan mencapai 108,4% atau melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan perincian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Capaian Indikator 1 Tahun 2020-2024**

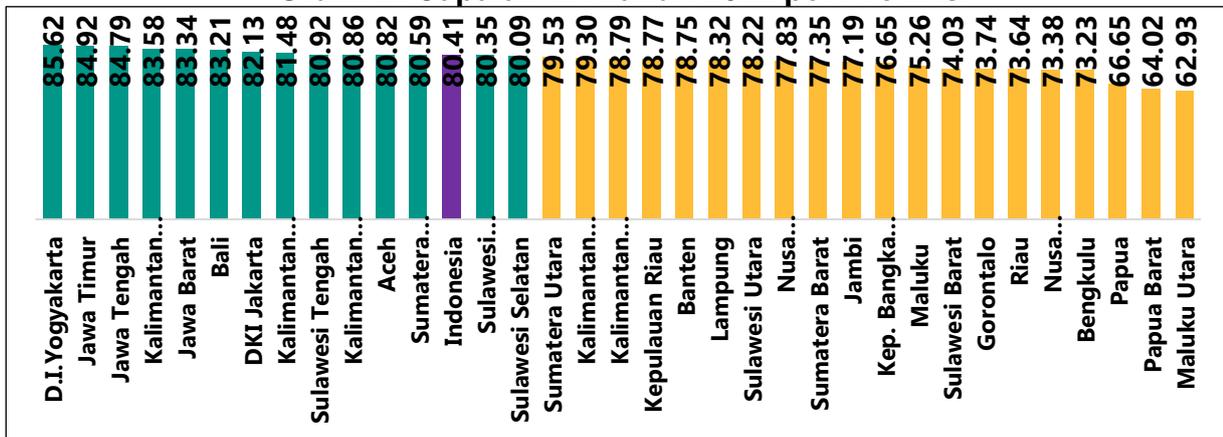
No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2020	100%	100%	100% (dengan catatan pembulatan)
2.	2021	100%	95,21%	95,21%
3.	2022	93%	107,17%	107,6%
4.	2023	94%	108,4%	115,3%

Kenaikan capaian IDI tahun 2022, merupakan dampak dari kenaikan capaian seluruh aspek dalam IDI. Sebagai informasi, IDI memiliki tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Aspek kebebasan tahun 2022 memperoleh nilai 82,80 atau naik 3,08 poin dari IDI 2021 yang hanya 79,72. Aspek kesetaraan mendapatkan nilai 80,28 atau naik 1,42 poin dari IDI 2021 sebesar 78,86. Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 78,22 atau naik 2,55 poin dari IDI 2021 sebesar 75,67.

Dari 34 provinsi, terdapat 14 provinsi yang memperoleh indeks kategori tinggi secara berurutan sebagai berikut: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Selatan. Adapun sisanya sebanyak 20 provinsi masuk dalam Kategori Sedang (skor 60 s.d 80). Tiga provinsi capaian terendah berturut-turut yakni Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi provinsi dengan capaian/skor <60 (Kategori Rendah).

**Grafik 2. Capaian IDI Tahun 2022 per Provinsi**



Sementara itu, indikator yang mengalami penurunan yakni pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antimonopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, kinerja lembaga yudikatif. Sedangkan untuk yang masuk dalam kategori rendah adalah indikator pemenuhan hak-hak pekerja dan kinerja lembaga legislatif. (Tabel 18)

Sebagai tindaklanjut, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian melalui kegiatan perjalanan dinas ke daerah, *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengan *stakeholder*. Bahkan, telah terbit rekomendasi terkait IDI untuk mengoptimalkan capaian tahun berikutnya yakni:

1. Surat Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Mensos, Mendikbud, Menag, Mendagri perihal Optimalisasi Akses Warga Miskin terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Perspektif Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BPS, perihal Percepatan Rilis Hasil Pengukuran IDI.

**Tabel 3. Capaian IDI Tahun 2022 per Indikator**

NO	Indikator IDI	TAHUN		KETERANGAN	KATEGORI
		2021	2022		
Aspek Kebebasan		79,72	82,80	Naik	Tinggi
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	95.49	98.09	Naik	Tinggi
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	96.78	96.81	Naik	Tinggi
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	95.70	95.75	Naik	Tinggi
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	97.44	97.44	Tetap	Tinggi
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	98.07	98.07	Tetap	Tinggi
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	49.27	51.43	Naik	Rendah
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75.06	72.88	Turun	Sedang
Aspek Kesetaraan		78,86	80,28	Naik	Tinggi
8	Kesetaraan gender	95.42	98.14	Naik	Tinggi
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100.00	100.00	Tetap	Tinggi
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	69.50	68.50	Turun	Sedang
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73.25	72.82	Turun	Sedang
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94.26	94.51	Naik	Tinggi
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	71.02	77.26	Naik	Sedang
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	76.61	76.81	Naik	Sedang
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		75,67	78,22	Naik	Sedang
15	Kinerja lembaga legislatif	12.12	42.42	Naik	Rendah
16	Kinerja lembaga yudikatif	92.12	87.19	Turun	Tinggi
17	Netralitas penyelenggara pemilu	84.62	84.62	Tetap	Tinggi
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	67.95	97.44	Naik	Tinggi
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	68.29	69.92	Naik	Sedang
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	71.43	100.00	Naik	Tinggi

21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	86.80	91.60	Naik	Tinggi
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	100.00	100.00	Tetap	Tinggi
NILAI IDI		78,12	80,41	Naik	Tinggi/Baik

Jika melihat keseluruhan proses penyusunan IDI, hal pokok dan klasik yang menjadi hambatan adalah terlambatnya target rilis, yang semula seharusnya terlaksana pada Maret 2023 (TW I), menjadi terlaksana pada awal Juli 2023 (TW III). Hal ini merupakan dampak dari beberapa penyempurnaan dalam proses penghitungan di BPS, juga faktor teknis lain, sehingga membutuhkan waktu ekstra. Pada TA 2024 mendatang, Kemenko Polhukam bersama dengan Tim IDI Pusat dan Kantor Staf Presiden telah berkomitmen untuk mendorong BPS agar target rilis IDI terlaksana pada Bulan April.

**b. Indikator kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.**

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam adalah mengukur sejauhmana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Perjanjian kinerja mengamanatkan agar masing-masing Asisten Deputi menghasilkan satu rekomendasi yang terkait dokumen perencanaan nasional yakni:

- a. Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat: Rekomendasi terkait Penguatan Demokrasi di Daerah;
- b. Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Rekomendasi terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat- Daerah;
- c. Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik: Jumlah Pengurus Parpol yang Mendapat Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila;
- d. Asdep Koordinasi Otonomi Khusus: Rekomendasi terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah.

Dalam perjanjian kinerja target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100%. Artinya empat rekomendasi yang diterbitkan harus sesuai dengan dokumen perencanaan Kemenko Polhukam yang juga mengacu pada dokumen perencanaan nasional.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan program prioritas. Tahun 2023, capaian untuk indikator persentase (%) rekomendasi kebijakan yang

dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam telah mencapai 100%.

**Tabel 4. Realisasi Rekomendasi sesuai Dokumen Perencanaan Kemenko Polhukam**

Unit Kerja	Target	Realisasi	%
Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	1	1	100%
Total	4	4	100%

Rekomendasi yang dihasilkan yakni:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan: Surat Menko Polhukam kepada Mensos, Mendikbud, Menag, Mendagri perihal Optimalisasi akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial dalam perspektif Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri perihal Rekomendasi pelaksanaan inovasi daerah;
3. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri, perihal Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus: Surat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah perihal Rekomendasi terkait Penyelesaian Regulasi Perdasus dan Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, melalui rapat koordinasi dan perjalanan dinas dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan instansi atau para *stakeholder* lainnya. Capaian indikator tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Capaian Indikator 2 Tahun 2020-2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2020	100%	100%
2.	2021	100%	100%
3.	2022	100%	50%
4.	2023	100%	100%

Target indikator dua dapat tercapai karena koordinasi yang intens dengan *stakeholders*. Selain itu, terdapat beberapa desk atau kelompok kerja (Pokja) seperti Desk terkait Pemilu, Tim terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat dan Pokja terkait Papua. Hal ini memudahkan dalam penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.

**c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti**

Yang dimaksud dengan persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti ini ditetapkan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Cara menghitung indikator 3 ini adalah (butir-butir rekomendasi yang ditindaklanjuti/butir-butir rekomendasi yang dihasilkan) x 100%. Jadi, setiap butir yang ada di dalam rekomendasi berpengaruh terhadap penilaian kinerja Deputy. Pada perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023, target indikator kinerja 3 sebesar 50%.

Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah direkomendasikan kepada K/L terkait. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Capaian Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2020	85%	85,71%
2.	2021	50%	96,4%
3.	2022	50%	96,5%
4.	2023	50%	96%

Adapun penjelasan terkait capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

**Tabel 7. Tindaklanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Keasdepan	Jumlah Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
1	Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3	6	6	100%
2	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	4	2	50%
3	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	4	28	28	100%
4	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus.	6	14	14	100%
TOTAL		15	52	50	96%

Salah satu faktor keberhasilan indikator ini dapat melebihi target adalah terdapat tim atau kelompok kerja seperti Tim IDI Pusat, Desk Pemilu dan Pokja Papua. Hal ini memudahkan untuk memantau perkembangan tindaklanjut dari rekomendasi. Namun demikian, terdapat satu rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti tahun ini, karena membutuhkan waktu. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi lebih lanjut.

**2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Pencapaian sasaran strategis dua adalah untuk terpenuhinya peningkatan birokrasi yang efektif. Pengukuran sasaran strategis menggunakan empat alat ukur indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 2**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2. Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1) Nilai SAKIP	BB	BB
	2) Nilai PMPRB	33,93	NA
	3) Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi	4	4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Politik Dalam Negeri (Skala 1-5)		
	4) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	87	90,25

**a. Indikator Kinerja 4: Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan diturunkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenko Polhukam.

Pelaksanaan SAKIP perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Evaluasi SAKIP dilakukan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenko Polhukam. Berdasarkan aturan tersebut evaluasi dilakukan terhadap empat komponen dan 12 sub komponen manajemen kinerja yang meliputi:

**Tabel 9. KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN SAKIP**

NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perencanaan telah tersedia (6%);</li> <li>b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART. Menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>cross cutting</i>) (9%);</li> <li>c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</li> </ul>
2.	Pengukuran Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%);</li> <li>ii. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah</li> </ul>

			<p>dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%);</p> <p>i. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%).</p>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%);</p> <p>b. Dokumen laporan kinerja yang telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%);</p> <p>c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian stategi/kebijakan dalam mencapaia kinerja berikutnya (7,5%)</p>
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%);</p> <p>b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (7,5%);</p> <p>c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja (12,5).</p>
Hasil Evaluasi		100%	

Hasil evaluasi dari komponen dan sub komponen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah nilai. Nilai SAKIP terdiri dari beberapa predikat sebagai berikut:

**Tabel 10. Predikat Penilaian SAKIP**

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja baik, dan sangat akuntabel
BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Target nilai SAKIP pada perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 adalah BB (Sangat Baik). Target ini berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 yakni A. Perbedaan ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi perubahan metode penghitungan seperti yang terjadi pada tahun 2022.

Namun demikian, Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tetap berupaya mencapai target tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja menitikberatkan pada tersedianya dokumen perencanaan, terpenuhinya standar yang baik pada dokumen perencanaan dengan indikator SMART, penyelarasan di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain. Dokumen perencanaan tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Untuk itu, upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bagi pejabat Eselon I s.d. II;
  - Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023;
  - Menyusun Rencana Aksi Tahun 2023;
  - Menyusun TOR dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 2023.
2. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan berjenjang serta berkelanjutan. Pengukuran kinerja ini dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan. Langkah yang dilakukan adalah
- Menyusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023'
  - Menyusun sasaran kinerja pegawai yang indikatornya berjenjang dari level atas sampai ke level yang paling bawah.
3. Pelaporan Kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja sebuah unit kerja. Upaya yang dilakukan untuk mencapai itu adalah:
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Tahunan 2023 serta periode triwulan I, II,III, dan IV tahun 2024;
  - Pelaporan kinerja eselon I dan II ke Silakip Kemenko Polhukam;
  - Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2024;
  - Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja ke esr.menpan.go.id
  - Penginputan data kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2025 pada aplikasi e-Monev Bappenas.
4. Evaluasi Kinerja merupakan sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan dapat mencapai target yang ditetapkan.. Adapun kegiatan sebagai berikut:
- Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam rapat internal staf Deputi Bidkooor Poldagri;
  - Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi program kerja selama triwulan I, II, III dan IV tahun 2023.
  - Telah dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-316/PW.03.00/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023, nilai SAKIP

yang diperoleh yakni BB. Capaian nilai BB tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan SAKIP Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Capaian tersebut sesuai dengan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Dengan demikian, capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 11. Nilai SAKIP Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Target	Nilai	Keterangan
1.	2020	A	A	Mengacu Permenpan RB 12/2015
2.	2021	A	A	Mengacu Permenpan RB 12/2015
3.	2022	A	BB	Mengacu Permenpan RB 88/2021
4.	2023	BB	BB	Mengacu Permenpan RB 88/2021

Nilai BB tersebut merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen dan subkomponen yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja telah tersedia, telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan, telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun demikian, pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan pemberian tunjangan kinerja. Selain itu, perlu adanya penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara triwulanan;
- c. Pelaporan kinerja telah menggambarkan kinerja, telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta berdampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan. Namun demikian, ke depan harus terdapat tata cara reviu internal;
- d. Evaluasi internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan meningkatkan implementasi SAKIP.

Faktor keberhasilan unit kerja mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam pelaksanaan akuntabilitas setelah melakukan beberapa diklat dan bimbingan teknis. Namun, secara kuantitatif masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SAKIP. Hal ini menyebabkan beban kerja meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut beban kerja dibagi rata dengan jumlah SDM yang ada.

## b. Indikator Kinerja 5: Nilai PMPRB

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sumber data RB adalah laporan hasil penilaian mandiri dari masing-masing ke deputian.

Nilai PMPRB akan dihitung oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dari delapan komponen yakni (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penataan Sistem Manajemen SDM; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023, Nilai PMPRB adalah 33,93. Target ini berbeda dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yakni 33,95 karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sehingga target tidak seoptimis perencanaan awal.

Tahun 2023 juga tidak terdapat hasil penilaian PMPRB karena terjadi perubahan dari *general* menjadi tematik sesuai dengan Permenpan RB Nomor. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Meski tidak ada lagi penilaian general, dalam rangka mendukung RB tematik tersebut, Deputi Bidkoo poldagri telah menerbitkan rekomendasi perihal optimalisasi akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial dalam perspektif Indeks Demokrasi Indonesia. Rekomendasi tersebut selaras dengan salah satu tema RB tematik. Sebagai informasi, terdapat empat fokus RB tematik yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, tematik prioritas Presiden seperti stunting dan penggunaan produk dalam negeri, serta digitalisasi administrasi pemerintahan. Dengan demikian, capaian indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 12. Capaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2020	23,37	33,93	145%
2.	2021	33,93	34,06	100,38%
3.	2022	33,94	35,70	105,18
4.	2023	33,93	NA	NA

Meski tahun ini tidak terdapat penilaian PMPRB, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

- Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
- Telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
- Penetapan agen perubahan (*agent of change*).

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan personel dalam jabatan dan kenaikan pangkat;
- Mengikuti kegiatan pembahasan revisi Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam

3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 125 Tahun 2022 tentang Desk Koordinasi Pemilihan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2023;
- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023;
- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Papua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023.

4. Penataan Sumber Daya Manusia

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022,
- Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023,
- Pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan SDM,
- Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Mengikuti Bimbingan Teknis dan Penginputan dokumen IKO Polhukam internal Kemenko Polhukam.

5. Penataan Tata Laksana

- Pengelolaan Peta Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Mengikuti rapat penyusunan laporan evaluasi kelembagaan Kemenko Polhukam.

6. Penguatan Pengawasan

- Pelaporan LHKPN/LHKASN.
- Menghadiri kegiatan evaluasi pengawasan eksternal dan internal Kemenko Polhukam
- Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri guna Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2023.

7. Penguatan Akuntabilitas Kerja

- Menyusun Perjanjian Kinerja serta manualnya bagi pejabat Eselon I dan II periode tahun 2023,
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
- Melakukan evaluasi kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara berkala setiap tiga bulan sekali,
- Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dan triwulan I, II, III dan IV tahun 2023,
- Menyusun simulasi penganggaran Kemenko Polhukam sesuai dengan implementasi Indeks Koordinasi Polhukam,
- Mempublikasi rencana pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Melakukan penyebaran kuisioner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
- Kedeputian I/Poldagri terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di-*update* maupun media sosial Kedeputian Bidkoo Poldagri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan *review* internal terhadap pelayanan kedeputian;

- Pelayanan pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat.
- Mengikuti *workshop instrument* dan *entry meeting* pengawasan kearsipan internal tahun 2023,
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- Evaluasi penggunaan akun Srikandi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- Rapat penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi tetap berupaya semaksimal mungkin, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Lingkungan kerja yang nyaman perlu dihadirkan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

**c. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengamanatkan agar penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai unit kerja yang juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pun melakukan survei kepuasan. Hasil survei tersebut dituangkan dalam Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi.

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada unit organisasi di Kedeputan Bidang Politik Dalam Negeri atau *stakeholder* lainnya. Tingkat kepuasan tamu ini diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sumber data dalam penghitungan indikator kinerja ini adalah penilaian berdasarkan survei internal dan eksternal Sekretariat Deputi.

Survei memuat 14 unsur yakni prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas,

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayan. Unsur tersebut kemudian diramu menjadi pertanyaan untuk responden.

Pelaksanaan survei tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan. *Pertama* adalah tahapan penyiapan bahan, mulai dari pembuatan kuisisioner di mana di dalamnya juga memuat umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden, kemudian pilihan jenis layanan yang diberikan dan pendapat responden terhadap pertanyaan mulai dari sangat sangat kurang. Tahap *kedua* adalah penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data. Responden yang mengikuti survei ini berjumlah 30 yang merupakan peserta rapat, audiensi dan internal Kemenko Polhukam. Lokasi pengumpulan data digali dari pelaksanaan kegiatan koordinasi di Keasdepan dan Sekretariat selama tahun 2023. Tahapan *ketiga*, adalah metode pengolahan data dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang.

Dari hasil survei tersebut, indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy sebesar 4. Artinya target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja telah tercapai, sehingga hasil saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 13 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidkooor Poldagri Tahun 2020-2023**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2020	4	4	100%
2.	2021	4	4,5	112,5%
3.	2022	4	4	100%
4.	2023	4	4	100%

Hasil survei kepuasan layanan Sekretariat Deputy Tahun 2023 ini dapat dikategorikan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi yakni kurangnya keseriusan dan obyektifitas responden/Masyarakat dalam memberikan pendapatnya karena kurangnya pemahaman responden tentang pentingnya hasil survei, kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan paradigma dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur dan kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan.

Selain itu, terdapat faktor kurangnya pengalaman petugas dalam melakukan survei karena petugas yang melakukan survei belum pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai survei sehingga belum memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya; petugas juga dinilai masih kurang dalam memberikan penjelasan tentang kuisisioner kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuisisionernya.

Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif pemecahan masalahnya adalah perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya survei, perlunya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik, dan peningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM) melalui seminar, pelatihan, dan diklat teknis tentang pelayanan publik.

**d. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi**

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran. Lembar kerja evaluasi yang disusun oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Indeks ini dihitung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi (PO) Kemenko Polhukam. Dalam penilaian tersebut setidaknya ada delapan komponen, yakni ketepatan waktu dokumen perencanaan (Bobot 7,5), keselarasan TOR dan RAB (Bobot 7,5), jumlah revisi (Bobot 10,00), keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional (Bobot 20,00), respons perencanaan unit organisasi, (Bobot 5,00) ketepatan waktu dokumen monev (Bobot 12,5), kualitas laporan kinerja (Bobot 12,5) , kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan (Bobot 12,5), respons bagian monev unit organisasi (Bobot 12,5).

Target Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Tahun 2023 yakni 87 berbeda dengan yang ada dalam Renstra 2020-2024 yang hanya 86. Pertimbangannya adalah untuk mengoptimalkan kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sehingga target yang ditetapkan tahun ini lebih optimis.

Untuk mencapai nilai tersebut, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

- a. Penyelarasan TOR dan RAB,
- b. Penyelarasan dokumen perencanaan unit dengan dokumen perencanaan nasional,
- c. Menyusun laporan kinerja tahun 2022;
- d. Menyusun laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2023;
- e. Penyusunan simulasi penganggaran Kemenko Polhukam sesuai dengan implementasi Indeks Koordinasi (IKO) Polhukam;
- f. Mengikuti kegiatan persiapan implementasi IKO Polhukam;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi triwulan I, II, III dan IV tahun 2023.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-369/PR.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, hal Penyampaian Nilai

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023, nilai indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran tahun 2023 adalah 90,25 atau 103,73% dari target. Dengan demikian capaian sampai saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Tahun 2020-2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2020	80	93,76	117,2
2.	2021	85	98	115,3
3.	2022	85	88	103,5
4.	2023	87	90,25	103,73

Capaian tersebut dapat dikatakan baik. Namun demikian, masih ada poin yang perlu ditingkatkan, salah satunya yakni mengenai keselarasan realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD). Ke depannya, harus menyesuaikan RPD. Selain itu, perlu peningkatan ketepatan waktu dokumen perencanaan seperti Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan. Unit kerja juga harus dapat mengoptimalkan POK sesuai perencanaan awal untuk meminimalkan jumlah revisi.

## G. Realisasi Anggaran

Pagu awal anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebesar Rp 21.586.133.000. Namun triwulan I tahun 2023 terjadi *automatic adjustment* menjadi Rp 19.031.346.000. Kemudian, pada September 2023, mendapatkan *automatic adjustment* menjadi Rp 19.842.124.000 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama tahun 2023 sebesar Rp 19.731.556.711,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau 99,44%. Secara umum kinerja anggaran sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama tahun 2023.

**Tabel 15. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Jan s.d. Des	%	Sisa
4551.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3.928.858.000	3.892.608.600	99,08	36.249.400
4551.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.643.177.000	1.632.180.702	99,33	10.996.298
4551.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol	1.413.917.000	1.406.832.459	99,5	7.084.541
4551.PBC.005	Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak	2.547.367.000	2.542.535.018	99,81	4.831.982
4551.PBC.009	Rekomendasi Kebijakan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2023	2.000.000.000	1.994.185.760	99,71	5.814.240
4551.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1.334.999.000	1.333.269.704	99,87	1.729.296
4551.ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat	5.488.297.000	5.451.108.978	99,32	37.188.022
4551. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	709.595.000	707.336.000	99,68	2.259.000
4551.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	775.914.000	771.499.490	99,43	4.414.510
<b>Jumlah</b>		<b>19.842.124.000</b>	<b>19.731.556.711</b>	<b>99,44</b>	<b>110.567.289</b>

## **BAB II**

### **PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN ISU PRIORITAS**

#### **A. Prioritas Nasional.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, didalam Peraturan Pemerintah tersebut disampaikan bahwa Program Prioritas Tahun 2024 terdiri 7 Prioritas Nasional dan yang akan dikawal Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah Prioritas Nasional 2 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### **B. Program Prioritas, Kegiatan Prioritas**

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, dan Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Tahun 2024 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024 yaitu difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangua jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Deputi Bidang Koordinasi pada tahun 2024 akan mengawal Prioritas Nasional 7 yaitu memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Prioritas Nasional 2 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Tabel 3.1  
Prioritas Nasional yang di kawal Deputi I/Poldagri

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas		Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Target Rekom
PN	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Demokrasi Internal, Transparan, dan Akuntabilitas Partai Politik	3
PN	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Demokrasi Internal, Transparan, dan Akuntabilitas Partai Politik	2
PN	02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Papua	Pembangunan Wilayah Papua	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan PusatDaerah di Provinsi Papua	2
		Pembangunan Wilayah Papua	Pembangunan Wilayah Papua	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan	2

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas		Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Target Rekom
				Hubungan Pusat Daerah di Provinsi Papua Barat	
PN	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	2

### C. Isu Prioritas

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Tahun 2024 selain mengawal Prioritas Nasional Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga akan mengawal isu strategi dan perintah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Isu strategis yang akan dikawal Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2024 sesuai di bawah ini.

#### a. Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Kebijakan tentang dukungan anggaran dan perbaikan tata kelola penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia;
- 2) Kebijakan tentang perubahan rentang waktu periode pengukuran IDI dari Januari - Desember menjadi Oktober – September;
- 3) Kebijakan tentang penyiapan instrument untuk menyosialisasikan RPP Ormas yang akan diundangkan pada tahun 2024

- b. Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
  - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; dan
  - 2) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan hubungan pusat daerah
- c. Koordinasi pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik
  - 1) Penguatan penyelenggaraan pemilu;
  - 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan; dan
  - 3) Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan ideology Pancasila.
- d. Koordinasi Otonomi Khusus
  - 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus wilayah Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta;
  - 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di wilayah Papua;
  - 3) Komunikasi kualitas dengan semua komponen masyarakat Papua guna penguatan kebangsaan dan rasa kepercayaan antar pemerintah dengan masyarakat Papua; dan
  - 4) Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di 4 (empat) daerah otonomi baru (DOB) Papua.
- e. Sekretariat Deputy
  - 1) Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
  - 2) Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
  - 3) Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
  - 4) Indeks Pengawasan Kearsipan Internal.

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN INDIKATOR CAPAIAN STRATEGI**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Terciptanya Indonesia yang “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait sesuai isu di bidang politik dalam negeri. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik dalam negeri akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat. Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Sebagai organisasi pengkoordinir, pesinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, maka Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Deputy Bidang Koordinasi Politik

Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dengan memperhatikan evaluasi hasil capaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019.

Pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu "menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

## 2. Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, maka rumusan misi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: "Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri" dengan membuat rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu :

- a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
- b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

## B. Tujuan

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 2020-2024. Tujuan yang telah ditetapkan merupakan penjabaran visi Presiden dalam rangka mencapai sasaran program prioritas. Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Stabilitas Politik dalam negeri serta transformasi layanan publik.  
Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan  
Indikator Tujuan : Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target Tujuan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sesuai pada table 3.1.

Tabel 3.1  
Indikator Tujuan Deputi I/Poldagri

No	Indikator Tujuan	Target	
		2023	2024
1	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	79,25	79,58

## C. Arah Kebijakan dan Strategi

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025

Arah kebijakan dan strategi yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu akan menjadi dasar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menyusun program. Dengan begitu, program Kedeputian dan Kementerian dapat berjalan selaras. Sebagai Unit Eselon I di

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan arah kebijakan dan strategi sesuai tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Arah Kebijakan Deputi I/Poldagri

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi fungsi otonomi daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia</li> </ul>
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik</li> </ul>

Arah Kebijakan	Strategi
	<p data-bbox="831 262 1318 353">Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <ul data-bbox="783 376 1289 685" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 376 1289 533">• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> <li data-bbox="783 544 1289 685">• Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	<ul data-bbox="783 710 1366 965" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 710 1366 965">• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.</li> </ul>
Penguatan pilar demokrasi	<ul data-bbox="783 990 1377 1025" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 990 1377 1025">• Koordinasi penguatan pilar demokrasi</li> </ul>
Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	<ul data-bbox="783 1050 1370 1137" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 1050 1370 1137">• Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat</li> </ul>
Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	<ul data-bbox="783 1162 1307 1249" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 1162 1307 1249">• Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri</li> </ul>
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	<ul data-bbox="783 1274 1342 1361" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 1274 1342 1361">• Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah</li> </ul>
Penataan Daerah Otonom Baru	<ul data-bbox="783 1442 1374 1529" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 1442 1374 1529">• Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru</li> </ul>
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	<ul data-bbox="783 1554 1366 1697" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 1554 1366 1697">• Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah</li> </ul>

#### D.Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (periode 2020-2024) disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan

atau dalam periode 2020-2024. Sasaran strategis disusun sebagai ukuran kinerja dari sebuah unit dalam mencapai visi. Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2020-2024, yaitu: “Meningkatnya kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian dalam upaya Penanganan Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri.”

Dari sasaran strategis tersebut maka Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan program agar dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan tujuan yang akan melaksanakan dua strategis yaitu : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif dan Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

### E. Indikator Capaian Strategi

Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan indikator yang akan di kawal dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Tabel 3.1  
Sasaran, Indikator dan Target

No	Sasaran/Indikator	2019 (Baseline)	Target		
			2021	2022	2024
1.	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif				
	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%	93	95%
2.	Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri				
	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A	A	A	A
	2. Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;				90
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	4	4	4	4,2

4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	80	85	85	87
---	----	----	----	----

Unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan indikator kinerja untuk mencapai strategi yang sudah ditetapkan sesuai table 3.2.

Tabel 3.2  
Indikator untuk mencapai Sasaran Strategi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	93%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%
Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	78
	2. Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	90
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	4
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	90

## **F. Rencana Aksi Untuk Mencapai Kinerja**

**Rencana Aksi** untuk mencapai Kinerja unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai Berikut :

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif

**Indikator 1** : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024;
2. Rapat koordinasi dan sinkronisasi K/L terkait peningkatan capaian IDI TA 2024;
3. Workshop finalisasi data hasil pengukuran IDI TA 2024;
4. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi mitigasi capaian IDI Provinsi TA 2024 di Sulawesi Selatan.

**Indikator 2** : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Kegiatan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Rekomendasi terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI):
  - a. Rapat Koordinasi dalam rangka pengawalan target Prioritas Nasional terkait peningkatan capaian IDI TA 2024;
  - b. Workshop identifikasi masalah dan sinkronisasi Program kegiatan K/L yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penguatan Demokrasi;
  - c. Rapat Koordinasi penyelarasan Capaian IDI Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025-2029;
  - d. Perjalanan Dinas dalam rangka identifikasi masalah terkait penguatan Konsolidasi Demokrasi;

- e. Perjalanan dinas dalam rangka penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Poja IDI Provinsi TA 2024 di Provinsi Sumatra Barat, Kalimantan Utara dan Maluku;
  - f. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi K/L terkait peningkatan Capaian IDI TA 2024;
  - g. Rapat Koordinasi perumusan rekomendasi IDI TA 2024 bersama Tim IDI Pusat (Kemendagri, Bappenas, dan BPS);
  - h. Rapat Koordinasi dalam rangka konsolidasi, verifikasi dan penyusunan data terkait IDI TA 2024;
  - i. Workshop finalisasi data hasil pengukuran IDI TA 2024;
  - j. Perjalanan Dinas dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait peningkatan capaian IDI TA 2024;
  - k. Sosialisasi hasil pengukuran IDI TA 2024 (launching dan cetak buku IDI);
  - l. Rapat evaluasi pelaksanaan integrasi IDI dalam perencanaan Daerah;
  - m. Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi mitigasi capaian IDI Provinsi TA 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - n. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Diseminasi hasil pengukuran IDI TA 2024.
2. Rekomendasi terkait pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan
- a. Rapat Koordinasi pemetaan isu nasional terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Rapat Koordinasi identifikasi pemetaan isu nasional dari aduan masyarakat terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - c. Rapat Koordinasi identifikasi isu inisiatif global terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - d. Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan Provinsi Sumut dan Maluku;
  - e. Rapat Koordinasi analisis pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - f. Rapat Koordinasi analisis pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - g. Perjalanan Dinas dalam rangka analisis potensi hambatan dan tantangan terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan di Provinsi NTT;

- h. Rapat Koordinasi analisis tumpang tindih terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - i. Rapat Koordinasi perumusan rekomendasi pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan bersama Kemendagri, Bappenas, Kemensos;
  - j. Perjalanan Dinas dalam rangka Optimalisasi pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - k. Rapat Koordinasi evaluasi Optimalisasi pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - l. Rapat Koordinasi evaluasi faktor hambatan terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - m. Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat;
  - n. Rapat Koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan dengan Kemendagri, Bappenas, Kemensos, Kemenko PMK;
3. Rekomendasi terkait penguatan penyelenggara Pemilu
- a. Rapat Koordinasi Kesiapan dan Langkah Strategis Pemerintah dalam Mengantisipasi Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024;
  - b. Rapat Koordinasi terkait Kesiapan Pemantauan Luar Negeri;
  - c. Rapat Koordinasi terkait Kesiapan Pemantauan Dalam Negeri;
  - d. Perjalanan Dinas Pemantauan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu;
  - e. Perjalanan Dinas Pemantauan Pemungutan Suara di Luar Negeri dan Dalam Negeri;
  - f. Rapat Koordinasi Fasilitasi Satker Penyelenggara Pilkada 2024;
  - g. Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Fasilitasi Pemerintah terhadap Satker Penyelenggara Pilkada;
  - h. Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Terkait Fasilitasi Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pilkada 2024;
  - i. Perjalanan Dinas Pemantauan ke penyelenggara pilkada di daerah yang menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas fasilitasi oleh pemerintah;
  - j. Rapat Koordinasi terkait Tindaklanjut Progres Fasilitasi Pemerintah dalam Memfasilitasi Penyelenggara Pilkada;

- k. Rapat Koordinasi situasi dan kondisi politik, hukum, dan keamanan dalam Tahapan Pilkada 2024;
  - l. Rapat Koordinasi Kolaborasi Kementerian dan Lembaga dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada 2024;
  - m. Perjalanan Dinas Pemantauan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 pada Tahapan Pemungutan Suara.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus (regulasi) pada daerah khusus, daerah Istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.
- a. Rapat Koordinasi terkait Identifikasi Isu Strategis di 3 Wilayah Istimewa (DI. Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta);
  - b. Rapat Koordinasi pemetaan isu/kebijakan nasional berdasarkan aduan atau permintaan masyarakat terkait Tata Kelola Pertanahan Aceh;
  - c. Rapat Koordinasi identifikasi isu terkait Pembentukan RUU DKI;
  - d. Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Tata Kelola Hubungan Pusat dan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - e. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan data terkait Tata kelola Hubungan Pusat dan Daerah di Daerah Istimewa Aceh;
  - f. Rapat Koordinasi analisis permasalahan Tata kelola Hubungan Pusat dan Daerah di 3 Wilayah istimewa (DI. Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta);
  - g. Perjalanan Dinas Dalam Rangka analisis permasalahan terkait Tata kelola Hubungan Pusat dan Daerah di Daerah Istimewa Aceh;
  - h. Melaksanakan Forum Komunikasi dan sinkronisasi terkait Tata kelola Hubungan Pusat dan Daerah di wilayah istimewa/otonomi khusus Aceh;
  - i. Rapat Koordinasi sinkronisasi Perumusan strategi dalam penyelesaian Qanun Pertanahan di Provinsi Aceh;
  - j. Rapat Koodinasi perumusan mekanisme kerja terkait tindak lanjut dalam penyelesaian penyelesaian Qanun di Provinsi Aceh.

**Indikator 3:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti. Kegiatan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Rapat koordinasi monitoring kebijakan sesuai dengan rekomendasi bidang demokrasi dan organisasi kemasyarakatan;
2. Rapat koordinasi monitoring kebijakan sesuai dengan rekomendasi bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Rapat koordinasi monitoring kebijakan sesuai dengan rekomendasi bidang pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol;

4. Rapat koordinasi monitoring kebijakan sesuai dengan rekomendasi bidang otonomi khusus.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

**Indikator 1:** Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam sebagai berikut:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I dan Eselon II Tahun 2024;
2. Menyusun usulan awal TOR dan RAB tahun 2025;
3. Melaksanakan revisi POK Tahun 2024;
4. Membuat SKP Tahun 2023 dan Rencana SKP Tahun 2024;
5. Menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan TA 2025;
7. Menyusun IKU, Pohon Kinerja dan Crosscutting;
8. Menginput Data Kinerja dan Anggaran Triwulan I pada Aplikasi E-monev;
9. Menginput Rencana Kerja Tahun 2025 pada aplikasi KRISNA;
10. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I, II, III dan IV (capaian Output, capaian Anggaran dan Rencana Aksi);
11. Rapat Penyusunan LAKIN Triwulan I;
12. Melaksanakan Reviu Lakin Tahun 2023;
13. Menginput Rencana Pengadaan pada aplikasi SIRUP;
14. Rapat Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka penguatan kinerja;
15. Menyusun pagu anggaran 2025 yang disesuaikan pada aplikasi KRISNA;
16. Menyusun RENSTRA 2025 – 2029;
17. Menyusun Rencana Penarikan Dana Tahun 2025.

**Indikator 2:** Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam sebagai berikut:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I dan Eselon II Tahun 2024;
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II, III dan IV (capaian Output, capaian Anggaran dan Rencana Aksi);

3. Menginput Data Kinerja dan Anggaran Triwulan II, III dan IV pada Aplikasi E-money;
4. Menyusun SKP Triwulan II, III dan IV;
5. Menyusun pagu anggaran 2025 yang disesuaikan pada aplikasi KRISNA;
6. Rapat Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka penguatan kinerja;
7. Menyusun IKU, Pohon Kinerja dan Crosscutting;

**Indikator 3:** Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam sebagai berikut:

1. Pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Penguatan Core Business Manajemen Pada Unit Deputi Bidkooor Politik Dalam Negeri;
2. Rapat Pembahasan Srikandi Versi 3 dalam rangka tertib administrasi;
3. Rapat Evaluasi Arsip dalam rangka Penguatan Arsip Unit Deputi Poldagri;
4. Rapat pengelolaan Arsip dalam rangka persiapan penilaian Arsip Unit Deputi Poldagri;
5. Fullboard Pembahasan Pengelolaan Arsip dan Literasi Arsip dalam rangka Indeks Pengawasan Arsip Internal unit Deputi Poldagri;
6. Rapat Pemantapan Srikandi Versi 3 unit Deputi Bidkooor Poldagri;
7. Implementasi Srikandi dalam rangka Penguatan Administrasi unit Deputi Poldagri.

**Indikator 4:** Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam sebagai berikut:

1. Rapat Evaluasi SKP tahun 2023 dan Penyusunan SKP tahun 2024;
2. Rapat Review Identifikasi SOP dan Persiapan Penyusunan Peta Kompetensi dalam rangka Implementasi Proses Bisnis unit Deputi Poldagri;
3. Pembahasan SOP dan Penyusunan Peta Kompetensi dalam rangka Implementasi Proses Bisnis unit Deputi Poldagri;
4. Rapat persiapan Penyusunan Pengelolaan Kebijakan SPIP;
5. Implementasi Pengelolaan Kebijakan SPIP Unit Deputi Poldagri dalam rangka Penilaian SPIP;

6. Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Evaluasi Survey 2023 dan Survey 2024;
7. Evaluasi Survey 2023 dan Penyusunan Kuwisioner Survey 2024;
8. Rapat persiapan Penyusunan Pengelolaan Inventaris BMN;
9. Pelaksanaan Pengelolaan Inventaris BMN;
10. Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Indeks Survey unit Deputi Poldagri;
11. Penyusunan Indeks Survey unit Deputi Poldagri;
12. Rapat Evaluasi SKP 2024 unit Deputi Bidkooor Politik Dalam Negeri

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk periode 2020-2024, sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maka Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri akan mendukung pelaksanaan program Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yaitu Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Fungsi yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mencakup:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, *Focus Group Discussion*, Seminar, Tim Kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Deputi Bidang Politik Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait antara lain; Kemendagri, Kemlu, Kemhan, Kemenkumham, BNPT,BAIS, Polri,TNI, BIG, Bappenas, dan BPS melalui:

1. Koordinasi
2. Sinkronisasi
3. Pengendalian
4. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

## A. Target Kinerja

Pada tahun 2024, terdapat dua sasaran strategis yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan Perjanjian Kinerja sesuai Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1  
Perjanjian Kinerja Deputy I/Poldagri TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	95%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	78
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	33, 94
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	4
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	90

## B. Kerangka Pendanaan

Program Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2024 mengacu pada Renstra Deputy I/Poldagri Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja

Kemenko Polhukam Tahun 2024. Dalam penyusunan pendanaan program Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, prinsip *money follow program* tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran program dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*.

Alokasi pendanaan pada program Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2024 sesuai Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Alokasi Anggaran Per Sub Output Kegiatan pada Deputi I/Poldagri

MAK	Sub Output Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)
1	2	3
4551	Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri	26.592.777.000
4551.ABC	Kebijakan Bidang Politik	5.708.993.000
4551.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.332.106.000
4551.ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus	1.550.860.000
4551.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam Pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat	4.376.887.000
4551.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	566.110.000
4551.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	619.020.000
4551.PBC	Kebijakan Bidang Politik	19.698.654.000
4551.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3.377.497.000
4551.PBC.003	Rekoemndasi Kebijakan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	5.976.785.000

Agar penyelesaian isu di bidang Politik Dalam Negeri dapat terlaksana dengan maksimal, maka unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menetapkan anggaran untuk mencapai kinerja sebesar Rp. 26.592.777.000 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Pulh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sesuai tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Alokasi Anggaran untuk mencapai kinerja Deputi I/Poldagri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Dlm Juta)
1	2	3	3
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	95%	25.407.647.000
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	100%	
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	100%	
Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	78	1.185.130.000
	2. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	90	
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	4	
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	90	

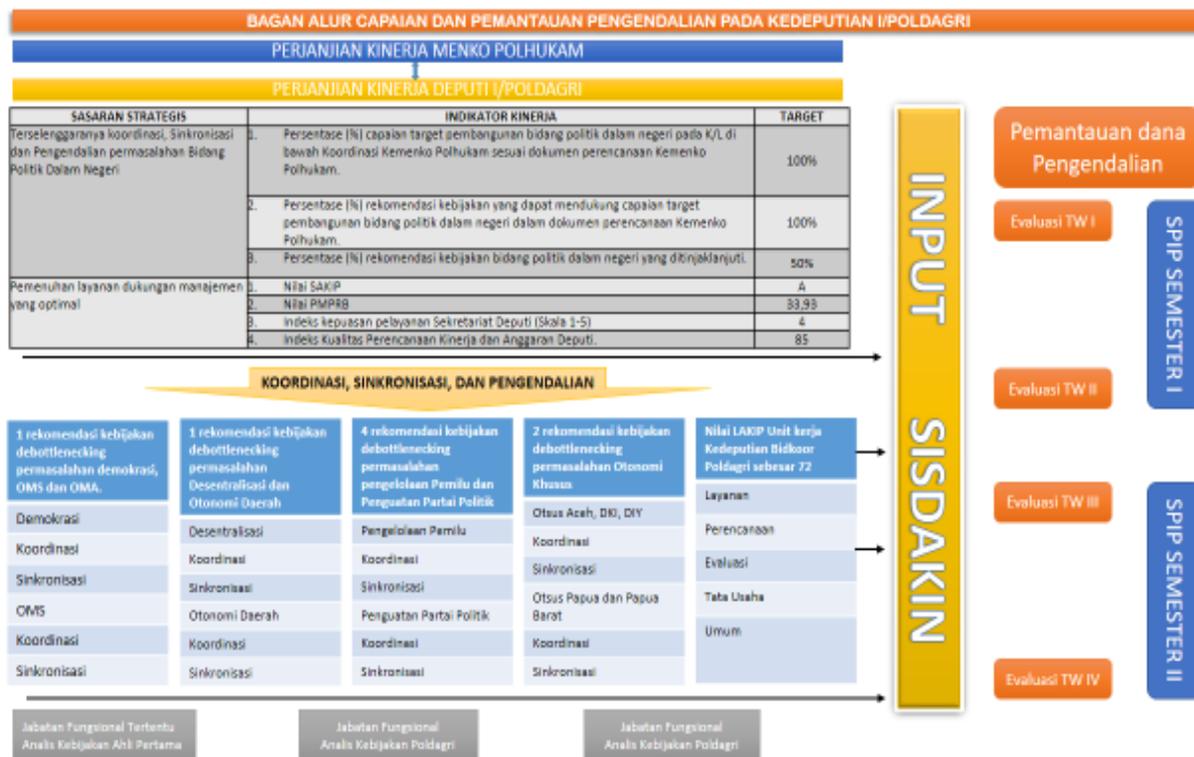
## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN**

Pemantauan dan pengendalian intern atau control intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal itu merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan capaian kinerjanya. Ia berperan penting untuk mencegah mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik berujud maupun tidak berwujud. Pada tingkatan organisasi tujuan peningkatan dan pengendalian adalah berkaitan dengan keandalan laporan kinerja, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pemantauan dan pengendalian merupakan proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andalan pelaporan keuangan, pengamanan aset organisasi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya pemantauan dan pengendalian, maka Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diterapkan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur dan terdokumentasi untuk mendapat hasil yang maksimal.

Berikut ini adalah bagan hubungan perjanjian kinerja Menko Polhukam sampai dengan Eselon IV pada Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang merupakan gambaran secara umum capaian kinerja yang harus dicapai dari Eselon IV s/d Eselon I untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Menko Polhukam

**Tabel 5.1**  
**Bagan Alur Capaian dan Pemantauan Pengendalian Kinerja Deputy I/Poldagri**



### Alur Pencapaian Sasaran Kinerja

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif dengan Indikator :
  - a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.
  - b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.
  - c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti.

Perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta melalui pelaksanaan tugas teknis lainnya. Seluruh pelaksanaan tersebut dilakukan pada unit kerja, terdiri dari Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asdep

Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol dan Asdep Koordinasi Otonomi Khusus.

Output maupun outcome yang harus dihasilkan para Asdep adalah seberapa banyak rekomendasi yang disampaikan kepada Kementerian / Lembaga terkait, sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dengan Kementerian / Lembaga tersebut.

Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

2. Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan indikator:

- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- b. Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- c. Indeks kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
- d. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal.

Capaian kinerja di atas didukung oleh kegiatan sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Pada kegiatan layanan tersebut akan dilaksanakan oleh Kabag Perencanaan dan Evaluasi dan Kabag Administrasi. Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan akuntabilitas kinerja Deputy dan Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan system informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan penyusunan pertauran perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan intern di lingkungan Deputy.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melaksanakan kegiatan guna mendukung Kemenko Polhukam dalam menjalankan tugas Pemerintahan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan system dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

**Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,**



Heri Wiranto, S.E, M.M.,M.Tr (Han)

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. SASARAN STRATEGIS K/L : Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Program Teknis)
3. SASARAN PROGRAM ESELON I : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif
4. KEGIATAN : Koordinasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri
5. UNIT ORGANISASI : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
6. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
<b>4551.001</b>	<b>Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif</b>		
001.01	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	95	%
001.02	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100	%
	1. Rekomendasi kebijakan terkait peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan	1	Dokumen

	hubungan pusat-daerah		
	2. Rekomendasi Kebijakan terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	1	Dokumen
	3. Rekomendasi kebijakan terkait peningkatan capaian IDI TA 2024 dan penguatan Pokja IDI Provinsi	2	Dokumen
	4. Rekomendasi Kebijakan terkait penguatan kapasitas Ormas serta Optimalisasi Pencegahan Ekstremisme, Radikalisme, dan Terorisme	1	Dokumen
	5. Rekomendasi kebijakan terkait penguatan penyelenggara pemilu	1	Dokumen
	6. Rekomendasi kebijakan terkait Jumlah Pengurus Parpol yang mendapat Pendidikan politik dan Penguatan Ideologi Pancasila	1	Dokumen
001.003	Persentase (%) rekomendasi kebijakan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.	50	%
<b>4551.002</b>	<b>Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>		
002.01	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78	Kategori
002.04	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinas Politik Dalam Negeri	90	%
002.03	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4	Indeks
	Indeks Pengawasan Kearsipan	90	Indeks

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	TARGET	SATUAN	ALOKASI 2024
1	2	3	4	5
<b>4551.001</b>	<b>Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif</b>			
<b>4551.ABC.001</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan bidang desentralisasi dan otonomi daerah lintas sektoral yang efektif</b>	<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>1.332.106.000</b>
001	Rekomendasi Kebijakan Bidang desentralisasi dan otonomi daerah			
051	Identifikasi Permasalahan Bidang Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	Laporan	410.018.000
052	Analisis Kebijakan Desentralisasi dan otonomi Daerah	3	Laporan	308.452.000
053	Penyusunan rekomendasi Desentralisasi dan otonomi Daerah	2	Laporan	256.140.000
054	Tindaklanjut rekomendasi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	Laporan	357.496.000
<b>4551.ABC.004</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam Pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat</b>	<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>4.376.887.000</b>
051	Operasional Pokja Bidang Polhukam Pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat	1	Laporan	<b>4.376.887.000</b>

<b>4551.PBC.001</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan</b>	<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>3.377.497.000</b>
051	Identifikasi Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan.	2	Laporan	425.274.000
052	Analisis Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan.	2	Laporan	1.030.425.000
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan.	2	Laporan	1.072.308.000
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan.	2	Laporan	849.490.000
<b>4551.PBC.003</b>	<b>Rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik</b>	<b>3</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>5.976.785.000</b>
051	Identifikasi Permasalahan Bidang pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2	Laporan	1.956.966.000
052	Analisis Kebijakan pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2	Laporan	1.972.955.000
053	Penyusunan rekomendasi pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2	Laporan	576.175.000
054	Tindaklanjut rekomendasi kebijakan pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2	Laporan	1.470.689.000
<b>4551.PBC.004</b>	<b>Penyelesaian permasalahan bidang otonomi khusus lintas sektoral yang efektif</b>	<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>1.478.943.000</b>
051	Identifikasi Permasalahan kebijakan otonomi khusus	2	Laporan	381.949.000

052	Analisis Kebijakan Otonomi Khusus	2	Laporan	529.850.000
053	Penyusunan rekomendasi kebijakan otonomi khusus	2	Laporan	183.714.000
054	Tindaklanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus	2	Laporan	383.430.000
<b>4551.PBC.005</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>8.865.429.000</b>
051	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam	1	Laporan	3.652.927.000
052	Analisis Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam	1	Laporan	2.496.177.000
053	Penyusunan rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam	1	Laporan	849.493.000
054	Tindaklanjut rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Kemenko Polhukam	1	Laporan	1.866.832.000
<b>4551.002</b>	<b>Meningkatkan Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>1.485.509.000</b>
<b>4551.EBA.962</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>566.110.000</b>
051	Operasional Manajemen Umum	1	Laporan	239.927.000
052	Operasional Administrasi Ketatausahaan	1	Laporan	326.183.000
<b>4551.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja</b>			<b>619.020.000</b>
4551.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1	Laporan	212.130.000

4551.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1	Laporan	229.100.000
4551.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
051	Perencanaan dan Monev Kinerja	1	Laporan	17.7790.000

#### 7. RENCANA KEGIATAN Mendukung Capaian Output

KODE	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (TRW)			
		I	II	III	IV
<b>4551.001</b>	<b>Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif</b>				
<b>4551.ABC.001</b>	<b>Penyelesaian permasalahan bidang desentralisasi dan otonomi daerah lintas sektoral yang efektif</b>				
051	Identifikasi Permasalahan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah				
	1. Rapat koordinasi identifikasi permasalahan desentralisasi dan Otonomi Daerah	√	√		
	2. Koordinasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Bengkulu, Yogyakarta, Sulawesi Utara)	√		√	
052	Analisis Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	√	√		
	2. Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dalam rangka analisis kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	√			
	3. Koordinasi dalam rangka analisis kebijakan Desentralisasi dan Otonomi	√	√		

	Daerah (NTT)				
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah		√	√	
	2. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara)		√	√	
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah		√	√	
	2. Perjanjian dinas dalam rangka tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat)		√	√	
	3. Seminar dalam rangka tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah			√	
<b>4551.ABC.004</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Pokja Papua Bidang Polhukam Pada Tim koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat</b>				
051	Operasional Pokja Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Pokja Papua Bidang Polhukam	√	√		

	2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Tingginya dinamika bidang politik dan keamanan di wilayah Papua memerlukan	√	√		
	3. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Isu Strategis Pokja Papua Bidang Polhukam		√		
	4. Rapat koordinasi (fullboard) dalam kota dilaksanakan dalam rangka perumusan isu strategis Pokja Papua Bidang Polhukam	√	√		
	5. Koordinasi Pokja Bidang Polhukam dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke 6 Provinsi di Wilayah Papua	√	√		
	6. Forum Koordinasi dan Komunikasi Pokja Papua Bidang Polhukam		√	√	
	7. Perjalanan Dinas dalam rangka penguatan citra positif papua di dalam dan luar negeri	√	√	√	√
	8. Fullboard Penyusunan Laporan Pelaksanaan Operasional Pokja Bidang Polhukam		√	√	√
<b>4551.PBC.001</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan</b>				
051	Identifikasi Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemsayarakatan.				
	1. Rakor terkait isu-isu peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia atau isu terkait demokrasi lainnya	√			
	2. Workshop Identifikasi Masalah dan Sinkronisasi Program Kegiatan K/L yang Memiliki Tugas dan Fungsi di Bidang Demokrasi dan/atau	√			
	3. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penyusunan IDI.	√			

	4. Identifikasi Masalah dalam Penguatan Konsolidasi Demokrasi dan Pembinaan Ormas di Daerah pada Masa Pemilu 2024.	√			
052	Analisis Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan.				
	1. IDI di Daerah guna Mendukung Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri pada Masa Pemilu 2024.		√	√	
	2. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Ormas di Daerah guna Mendukung Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri pada Masa Pemilu 2024.		√		
	3. Operasional Tim Koordinasi Percepatan Penyusunan IDI.	√	√	√	√
	4. Rapat Koordinasi terkait isu-isu Pencegahan Ekstremisme, Radikalisme, dan Terorisme yang Berpotensi Mengganggu Tahapan Pemilu 2024		√		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan.				
	1. Workshop Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional terkait Peningkatan Capaian IDI atau Peningkatan Kapasitas Ormas			√	
	2. Rakortas Tingkat Menteri/Eselon I guna Membahas Isu-isu Strategis Nasional			√	
	3. Konsolidasi, Verifikasi, dan Penyusunan Data/Analisis terkait Indeks Demokrasi Indonesia.		√	√	
	4. Workshop Finalisasi Data Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.		√	√	
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan.				
	1. Diseminasi Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia			√	
	2. Launching dan Sosialisasi Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2023				√

	dalam rangka Mendukung Konsolidasi Demokrasi di Tahun Pemilu.				
	3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Ormas di Daerah.				√
	4. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Korsidal di Bidang Penguatan Demokrasi dan Pengelolaan Ormas.				√
<b>4551.PBC.003</b>	<b>Penyelesaian permasalahan bidang pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik lintas sektoral yang efektif</b>				
051	Identifikasi Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka indentifikasi satker Penyelenggara Pemilu yang perlu mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2024	√			
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka indentifikasi masalah bidang Pengelolaan Pemilu dan Pengawasan Prioritas Nasional terkait output rekomendasi	√			
	3. Rapat Koordinasi dalam rangka indentifikasi masalah bidang pengelolaan pemilu tentang jumlah satker penyelenggara pemilu yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024	√			
	4. Rapat Koordinasi dalam rangka identifikasi dan pengumpulan data terkait Jumlah Satker Penyelenggara Pemilu yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	√			
	5. Rapat Koordinasi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka Identifikasi masalah dan belanja masalah tentang implementasi	√			

	Pendidikan Politik kepada kader Partai Politik				
	6. Rapat Koordinasi dalam rangka indentifikasi masalah bidang pengelolaan pemilu tentang pengurus Parpol dan pembina harian Parpol di Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan tindakan kepada Parpol terhadap bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik.	✓			
	7. Fullboard dalam rangka identifikasi kebijakan serta pengumpulan data jumlah satker penyelenggara pemilu yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah untuk persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang	✓			
	8. Perjalanan Dinas dalam rangka identifikasi permasalahan bidang pengelolaan pemilu	✓			
052	Analisis Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis potensi resiko serta dampak yang ditimbulkan bidang pengelolaan pemilu terkait tahapan pemilu tahun 2024.		✓		
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis masalah bidang Pengelolaan Pemilu dan Pengawasan Prioritas Nasional terkait output rekomendasi.		✓		
	3. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis masalah bidang pengelolaan pemilu tentang jumlah satker penyelenggara pemilu yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya dalam menyukseskan pemilu tahun 2024		✓		
	4. Rapat Koordinasi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat dan Daerah dalam		✓		

	rangka Pemetaan Kebijakan dan langkah strategi terkait implementasi Pendidikan Politik kepada kader Partai Politik.				
	5. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis permasalahan terkait Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila.		√		
	6. Perjalanan Dinas dalam rangka analisa Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik		√		
	7. Fullboard dalam rangka analisis kebijakan dan melakukan klasifikasi isu strategis terkait peningkatan jumlah kader partai politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila untuk persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang		√		
	8. Fullboard dalam rangka analisis kebijakan dan melakukan klasifikasi isu strategis terkait implementasi bantuan keuangan partai politik untuk peningkatan jumlah kader partai politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila untuk persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang.		√		
	9. Fullboard dalam rangka analisis klasifikasi isu strategis terkait peningkatan jumlah kader partai politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila sebagai bahan penyusunan rekomendasi.		√		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi			√	

	peningkatan Jumlah Satker Penyelenggara Pemilu yang difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.				
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi peningkatan Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila.			√	
	3. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik			√	
	4. Fullboard dimaksud sebagai media komunikasi dalam rangka Penyusunan rekomendasi Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila			√	
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka Memonitor tindak lanjut rekomendasi Jumlah Satker Penyelenggara Pemilu yang difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah				√
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka memonitor tindak lanjut rekomendasi tentang Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila.				√
	3. Fullbord dalam rangka membuka komunikasi kepada K/L serta evaluasi faktor-faktor kegagalan terhadap tindak lanjut rekomendasi peningkatan Jumlah Satker Penyelenggara Pemilu yang difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah				√
	4. Fullbord dalam rangka Memonitor tindak lanjut rekomendasi tentang Jumlah Kader Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila				√

	5. Perjalanan Dinas rangka memonitor tindak lanjut rekomendasi kebijakan Penguatan Partai Politik				√
<b>4551.PBC.004</b>	<b>Penyelesaian permasalahan bidang otonomi khusus lintas sektoral yang efektif</b>				
051	Identifikasi Permasalahan kebijakan otonomi khusus				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka identifikasi permasalahan kebijakan Otsus Penataan regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi atau regulasi pada Daerah Istimewa/Otonomi Khusus (Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta)	√	√		
	2. Melaksanakan koordinasi kebijakan otonomi khusus ke Provinsi Aceh dalam rangka identifikasi permasalahan pembentukan regulasi sebagai implementasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	√	√		
	3. Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang otonomi khusus ke D.I. Yogyakarta dalam rangka identifikasi permasalahan pembentukan regulasi sebagai implementasi UU terkait keistimewaan Yogyakarta.	√	√		
	4. Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang otonomi khusus ke Provinsi Papua dalam rangka identifikasi permasalahan pembentukan regulasi sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	√	√		
	5. Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang otonomi khusus ke Provinsi Papua Barat dalam rangka identifikasi permasalahan pembentukan regulasi sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	√	√		
052	Analisis Kebijakan Otonomi Khusus.				

	1. Rapat koordinasi dalam rangka analisis kebijakan bidang otonomi khusus terkait Penataan regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi atau regulasi pada Daerah Istimewa/Otonomi Khusus (Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta).		√	√	
	2. Pembentukan regulasi kekhususan Provinsi Jakarta, pasca di undangkannya IKN.		√		
	3. Perjalanan dinas dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh		√		
	4. Perjalanan dinas dalam rangka Penataan regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi atau regulasi pada Daerah Otonomi Khusus di wilayah Papua		√		
	5. Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Kebijakan Bidang Otonomi Khusus terkait Pembentukan regulasi kekhususan Provinsi Jakarta, pasca di undangkannya IKN di Jakarta.		√		
	6. Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Penataan regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi atau regulasi pada Daerah Otonomi Khusus di wilayah Papua.		√		
053	Penyusunan rekomendasi kebijakan otonomi khusus				
	1. Rapat sinkronisasi (fullday) dalam kota penyusunan rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus Penyusunan remokmendasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan regulasi pada Daerah Istimewa/Otonomi Khusus (Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta).			√	√
	2. Penyusunan remokmendasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan			√	

	otonomi atau regulasi pada Daerah Otonomi Khusus di wilayah Papua.				
	3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rekomendasi ke Bogor, Jawa Barat dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan regulasi pada Daerah Istimewa/Otonomi Khusus Aceh			√	
	4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rekomendasi ke Bandung, Jawa Barat dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus atau regulasi pada Daerah Otonomi Khusus di wilayah Papua			√	
054	Tindaklanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus				
	1. Rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus terkait pembentukan regulasi daerah sebagai implementasi UU Otsus di Aceh			√	
	2. Rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus terkait Pembentukan regulasi kekhususan Provinsi Jakarta, pasca di undangkannya IKN di Jakarta			√	
	3. Perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut rekomendasi kebijakan otonomi khusus Rapat Koordinasi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi kebijakan Otonomi khusus terkait pembentukan regulasi daerah sebagai implementasi UU Otsus di Wilayah Papua				
	4. Rapat koordinasi (Fullboard) dalam kota membahas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus.				
	5. Rapat koordinasi (Fullboard) luar kota membahas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kebijakan Otonomi Khusus.				
<b>4551.PBC.005</b>	<b>Penyelesaian permasalahan Desk Pemilu lintas sektoral yang efektif</b>				

051	Identifikasi Permasalahan Bidang Desk Koordinasi Pemilu				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka identifikasi masalah pada Impelementasi tahapan pemilu serentak 2024	✓			
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka identifikasi masalah terkait mitigasi kerawanan pemilu jelang pemungutan suara pemilu 2024.	✓			
	3. Rapat Koordinasi dalam rangka identifikasi masalah untuk mengetahui rencana kontijensi penyelenggara pemilu terkait pendistribusian logistik yang tepat waktu	✓			
	4. Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan yang berpengaruh terhadap Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024:	✓			
	5. Rapat Koordinasi Identifikasi situasi dan kondisi Politik, Hukum dan Kemananan Menjelang Pemilihan Serentak	✓			
	6. Perjalanan Dinas Identifikasi Permasalahan Desk Koordinasi Pemilu	✓			
	7. Seminar Nasional Kolaborasi Pemerintah Dalam Menyukkseskan Pesta Demokrasi 2024	✓			
052	Analisis Kebijakan Bidang Desk Koordinasi Pemilu.				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis dan pemetaan kebijakan serta langkah strategis kesiapan pemerintah dalam menangani isu-isu sara dan money politik jelang pemilu serentak tahun 2024		✓		
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka analisis potensi dan resiko menjelang pemilu serentak tahun 2024		✓		
	3. Rapat Koordinasi analisis permasalahan terkait kesiapan satker penyelenggara pemilu di daerah		✓		

	4. Rapat Koordinasi Membahas Situasi Politik, Hukum, dan Keamanan Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024		✓		
	5. Perjalanan Dinas Analisis Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu		✓		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Desk Koordinasi Pemilu				
	1. Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu 2024			✓	
	2. Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penguatan penyelenggara pemilu serentak tahun 2024			✓	
	3. Rapat Koordinasi Hak Memilih dan Dipilih Menjelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024.			✓	
	4. Perjalanan Dinas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu			✓	
054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Desk Koordinasi Pemilu				
	1. Rapat Koordinasi dalam tindaklanjut rekomendasi terkait kebijakan Desk Pemilu 2024				✓
	2. Rakor Evaluasi Hak Memilih dan Dipilih pada saat Pemilu dan Pilkada Tahun 2024				✓
	3. Fullboard dalam rangka tindaklanjut rekomendasi Desk Koordinasi Pemilu 2024 terkait rekomendasi kebijakan Penguatan Penyelenggra Pemilu 2024 yang ditinjau dari banyak aspek				✓
	4. Kegiatan Fullboard Tindak Lanjut Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih				✓

	5. Perjalanan Dinas Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu				√
	6. Seminar Nasional Mengevaluasi Pesta Demokrasi Tahun 2024 untuk Menyongsong Kedewasaan Demokrasi Indonesia.				√
<b>4551.002</b>	<b>Meningkatkan Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>				
<b>4551.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>				
051	Operasional Manajemen Umum				
	1. Rapat koordinasi sebanyak 4 kali dalam rangka pembahasan terkait pendataan SIMAK BMN unit kerja, validasi data pegawai dilaksanakan per triwulan	√	√	√	√
	2. Melaksanakan Fullboard Dalam Kota sebanyak 2 kali dalam rangka pengisian Rencana kinerja dan realisasi kinerja pada aplikasi eKinerja.go.id, serta pembahasan penilaian kinerja	√	√		
	3. Perjalanan dinas sebanyak 2 kali dalam rangka kegiatan tata kelola pegawai dalam pengarsipan persuratan yang diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenko Polhukam	√	√		
052	Penyusunan laporan Pengelolaan Arsip				
	1. Rapat koordinasi sebanyak 4 kali dalam rangka pembahasan terkait pencerahan proses pengarsipan, dan penyusunan laporan pengelolaan arsip dilaksanakan per triwulan	√	√	√	√
	2. Melaksanakan Fullboard ke Jawa Barat 2 kali pada bulan Februari Tahun 2024 dalam rangka Bimtek Srikandi dan pencerahan kembali tentang proses pengarsipan		√	√	

053	Operasional Administrasi Ketatausahaan				
	1. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	√	√	√	√
	2. Implementasi Road Map RB Tahun 2020-2024	√		√	
	3. Pembahasan tindak lanjut rencana aksi pada 7 area Reformasi Birokrasi		√	√	
	4. Monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi Semester 1		√		
	5. Monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi Semester 2				√
	6. Melaksanakan Fullboard ke Jakarta 2 kali dalam rangka penyusunan Rencana Aksi dan capaian rencana aksi		√	√	
	7. Melaksanakan Perjalanan dinas sebanyak 2 kali yaitu ke Jawa Timur dan Bali sebagai benchmark kedaerah yang unggul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi			√	√
	8. Persiapan Penyusunan Indikator Survei Layanan Tata Usaha dan Umum Tahun 2023			√	
	9. Penyusunan hasil Survey Layanan Tata Usaha dan Umum Tahun 2023			√	
	10. Melaksanakan Fulday Dalam kota sebanyak 2 kali dalam rangka penyusunan indikator survey layanan tata usaha dan umum Tahun 2024 dan penyusunan hasil survey Layanan Tata Usaha dan Umum Tahun 2023			√	√
<b>4551.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				
4551.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				
	1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Para Pejabat dan Para Analis	√	√	√	

	sebanyak 3 kali dalam rangka pembahasan awal penyusunan usulan TOR dan RAB di Unit Kerja Deputi Bidkooor Poldagri				
	2. Melaksanakan Fullboard 2 kali di Jakarta dalam rangka penyusunan anggaran Pagu Indikatif dan Pagu anggaran Tahun 2025 dengan		√	√	
	3. Melaksanakan Fullday di Jakarta sebanyak 1 Kali dalam rangka kegiatan pembahasan Pagu Alokasi Tahun 2024	√			
	4. Perjalanan dinas sebanyak 3 kali dalam rangka menghadiri undangan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja, RKA K/L	√	√	√	
4551.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				
	1. Rapat koordinasi sebanyak 7 kali dalam rangka pemantauan capaian Perjanjian Kinerja dengan melibatkan seluruh pejabat, staf Kedeputian Bidang Koordinasi Poltik Dalam Negeri	√	√	√	√
	2. Melaksanakan Fullboard Dalam Kota sebanyak 2 kali dalam rangka pembahasan LAKIP Deputi I/Poldagri TA. 2024 dan pembahasan LAKIN Tw 2	√	√		
	3. Melaksanakan Fullday dalam kota sebanyak 1 Kali dalam rangka pembahasan LAKIN Trw 4				√
	4. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan penyusunan laporan kinerja per triwulan dan Lakip Tahun 2024				√
4551.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja				
051	Perencanaan dan Monev Kinerja				
	1. Rapat koordinasi dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam rangka pemetaan kinerja dan penyusunan Agenda Setting dan Identifikasi Masalah di lingkungan Deputi Bidkooor Poldagri dan Pembahasan Program Prioritas		√	√	√

	yang dikawal Deputi I/Poldagri berdasarkan RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024				
	2. Melaksanakan Fullboard di Jawa barat sebanyak 2 kali dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Renstra 2025-2029 Deputi I/Poldagri dan Perjanjian Kinerja Deputi I/Poldagri	√			√
	3. Melaksanakan Fullday di Jawa Barat sebanyak 2 Kali dalam rangka Monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2			√	√
	4. Melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 3 kali dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan Rencana Aksi pencapaian Perjanjian Kinerja		√	√	√

Jakarta, 20 Januari 2024  
Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Dalam Negeri,



Dr. Heri Wiranto, S.E., M.M., MTr. (Han)